



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FRAUD* DI SEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG

Dhermawati Putri Mustikasari[✉]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2013
Disetujui Juli 2013
Dipublikasikan Agustus 2013

Keywords:
Enforcement of Laws / Regulations; Fraud; Internal Control, Information Asymmetry, Suitability of Compensation,

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi pegawai di instansi pemerintahan tentang pengaruh penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan. Populasi penelitian ini terdiri dari 6780 pegawai, sampel penelitian sejumlah 153 pegawai instansi pemerintahan di Kabupaten Batang. Teknik penarikan sampel menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis *full model Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat analisis *smartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the perceptions of employees in government agencies on the effects of law enforcement / regulations, effectiveness of internal control, information asymmetry, the suitability of compensation, procedural fairness, cultural ethical management, and organizational commitment to fraud in the government sector. The study population consisted of 6780 employees, 153 employees sample a number of government agencies in Batang. Sampling technique using convenience sampling. Data collection using questionnaires. Analyzed using a full model of Structural Equation Modeling (SEM) with smartPLS analysis tools. The results showed a negative influence between law enforcement / regulations, effectiveness of internal control, compliance compensation, ethical culture management, and organizational commitment to fraud in the government sector. There is a positive effect between information asymmetry with fraud in the government sector. There is not influence between procedural justice by fraud in the government sector.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gdg. C6 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang, 50233
E-mail: dhermawati22@gmail.com

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu pemerintahan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut haruslah didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pegawainya. Namun, pada kenyataannya banyak kasus *fraud* yang terjadi di kalangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. *Fraud* menurut standar institute of internal auditors (iia) dalam sawyer (2006:339) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan penyimpangan yang disengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. *Association of certified fraud examinations (acfe)* membagi kecurangan (*fraud*) dalam tiga jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu: penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan rekayasa laporan keuangan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Tindakan-tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Kasus kecurangan yang sering terjadi baik di instansi pemerintahan maupun instansi swasta adalah kasus korupsi. Di instansi pemerintah, kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan yang surplus. Selain itu kecurangan bisa juga terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan tersebut

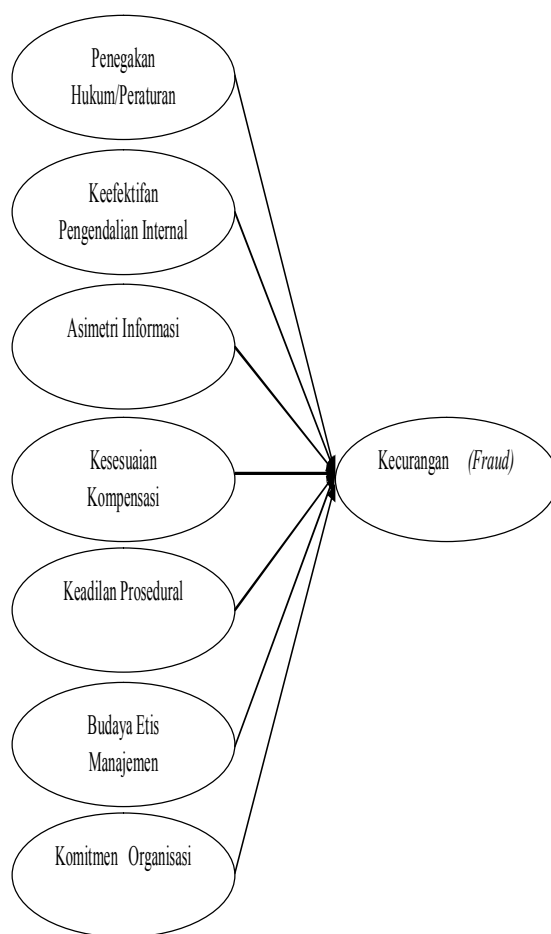
dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

Kasus-kasus tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi di instansi pemerintah daerah kini kian marak terjadi. Kejaksaan tinggi jawa tengah pada bulan mei 2008 telah menetapkan bambang bintoro yang saat itu aktif menjabat sebagai bupati batang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi apbd pada tahun 2004. Selain menjadikan bambang bintoro sebagai tersangka, sri sugiarti, eks kabag keuangan pemkab batang juga didakwa ikut terlibat dalam kasus tersebut karena diduga mencairkan dana purnabakti dprd batang atas perintah dari bambang bintoro. Kasus lain yang menjerat bupati batang pada tahun 2005 adalah kasus pelanggaran keppres no. 80/2003 pasal 10 yang mengharuskan adanya tender bagi proyek yang nilainya diatas rp 50 juta. Dalam kasus ini dprd langsung menyetujui usulan bupati dalam proyek itu kendati tidak ada dalam skala prioritas rencana anggaran daerah.

Selain kasus yang menjerat mantan bupati batang dan para mantan pejabat dprd kabupaten batang tersebut, pada tahun 2007 telah terjadi kasus dugaan korupsi anggaran dana pilkada tahun 2007 sebesar rp 300,5 juta yang melibatkan bendahara komisi pemilihan umum (kpu) batang djaka mulyadi. Pada tahun tahun 2008 kasus dugaan korupsi pemotongan dana retribusi lelang di tempat pelelangan ikan (tpe) batang sebesar rp 1,2 milyar yang menjerat manajer kud ngupoyo mino, rozi sahidin. Kasus lainnya yaitu pada tahun 2011 juga terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan dodit bayu purnama, pelaksana proyek betonisasi jalan desa gerlang kecamatan blado batang tahun 2008. Dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa terbukti meminjam bendera cv tempel dan menjanjikan komisi sebesar 2 persen dari nilai proyek ditambah pembagian keuntungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *fraud triangle* yang diungkapkan oleh cressey (1953) dalam tuanakotta (2007:105) bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) didasari oleh adanya kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan pembenaran (*rationalization*). Variabel yang akan diteliti merupakan proksi

dari ketiga faktor tersebut. Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian ini *opportunity* diproksikan oleh variabel penegakan peraturan/hukum, variabel keefektifan pengendalian internal, dan variabel asimetri informasi. Tekanan (*pressure*) merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini *pressure* diproksikan oleh variabel kesesuaian kompensasi dan variabel keadilan prosedural. Pembeneran (*rationalization*) merupakan sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu karyawan untuk merasionalkan tindak kecurangan. Dalam penelitian ini *rationalization* diproksikan oleh variabel budaya etis manajemen dan komitmen organisasi.

Beberapa peneliti telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan, antara lain penelitian wilopo tahun 2006 mengatakan bahwa variabel kpi berpengaruh negatif terhadap *fraud*, variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dan variabel kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Pada penelitian sulistyowati pada tahun 2007 menyatakan hasil bahwa variabel budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan variabel kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian wilopo tahun 2008 menunjukkan hasil variabel kpi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan pada penelitian rahmawati dan soetikno 2012 menyatakan bahwa variabel kpi berpengaruh negatif terhadap *fraud*, variabel asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Atas dasar ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik meneliti kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan. Obyek penelitian dipilih berdasarkan observasi awal dimana banyak ditemukan kasus korupsi yang terjadi di instansi-instansi kabupaten batang yang melibatkan pejabat-pejabat yang berada di dalamnya.



Gambar 1. kerangka pemikiran teoritis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang diajukan maka diambil hipotesis sebagai berikut:

- H1 :penegakan hukum/peraturan berpengaruh negative terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
- H2 :keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
- H3 :asimetri informasi berpengaruh positif terhadap terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
- H4 :kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan
- H5 :keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

- H6 :budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap fraud disektor pemerintahan kerja, (3) pelaksanaan tugas, dan (4) tanggung jawab.
- H7 :komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud disektor pemerintahan Keefektifan pengendalian internal adalah persepsi pegawai tentang keefektifan proses yang diterapkan dan dijalankan dalam perusahaan atau instansi. Indikator pengukuran variabel keefektifan pengendalian internal yang dikembangkan oleh wilopo (2006) adalah sebagai berikut: penerapan wewenang dan tanggung jawab, pencatatan transaksi, pengendalian fisik, sistem akuntansi, pemantauan dan evaluasi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap yang bekerja di dinas se kabupaten batang. Penentuan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sample*. Dimana sampel yang diambil berdasarkan kesediaan dari pegawai masing-masing dinas yang bersedia menjadi responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 153 pegawai pemerintahan kabupaten batang. Data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing responden. Dimana penilianaannya dengan skala likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut: 1 = sangat tidak setuju (sts), 2 = tidak setuju (ts), 3 = netral (n), 4 = tidak setuju (ts), 5 = sangat setuju (ss).

Variabel penelitian

Variabel dependen (y)

Fraud secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Variabel *fraud* di ukur dengan indikator yang dikembangkan oleh iai (2001) sebagai berikut: (1) kecurangan laporan keuangan, (2) penyalahgunaan asset, dan (3) korupsi.

Variabel independen (x)

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Variabel penegakan hukum diukur menggunakan indikator: (1) peraturan organisasi, (2) disiplin

Asimetri informasi adalah persepsi pegawai tentang ketidaksesuaian informasin yang dimiliki oleh pihak *principal* dan *agent*. Indikator pengukuran variabel asimetri informasi yang dikembangkan oleh dunk (1993) dalam wilopo (2006) adalah: (1) situasi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas *aktivitas*, (2) situasi di mana manajemen lebih mengenal *hubungan input-output*, (3) situasi di mana manajemen lebih mengetahui *potensi kinerja*, (4) situasi di mana manajemen lebih mengenal *teknis pekerjaan*, (5) situasi di mana manajemen lebih mengetahui *pengaruh faktor eksternal*, (6) situasi di mana manajemen lebih mengerti *apa yang dapat dicapai*.

Kesesuaian kompensasi adalah persepsi pegawai tentang kesesuaian imbalan atau gaji dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Indikator pengukuran kesesuaian kompensasi yang dikembangkan oleh wilopo (2006) meliputi: (1) kompensasi keuangan, (2) pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, (3) promosi, (4) penyelesaian tugas, (5) pencapaian sasaran, (6) pengembangan pribadi.

Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses yang dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (ivancevich, 2006:161). Indikator pengukuran kesesuaian kompensasi yang dikembangkan oleh colquitt (2001) meliputi: (1) prosedur kompensasi mengekspresikan pandangan dan perasaan, (2) penetapan prosedur kompensasi melibatkan

karyawan, (3) prosedur kompensasi diaplikasikan secara konsisten, (4) prosedur kompensasi tidak mengandung kepentingan tertentu, (5) prosedur kompensasi didasarkan pada informasi yang akurat, (6) prosedur kompensasi memungkinkan pemberian masukan dan koreksi, (7) prosedur kompensasi sesuai dengan etika dan moral.

Budaya etis manajemen adalah persepsi pegawai tentang tindakan, pola tingkah laku, dan kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi seluruh pegawai yang berada di dalam instansi. Indikator pengukuran variabel budaya etis manajemen yang dikembangkan oleh robins (2008) meliputi: (1) model peran yang visible, (2) komunikasi harapan-harapan etis, (3) pelatihan etis, (4) hukuman bagi tindakan etis, (5) mekanisme perlindungan etika. Komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai tentang rasa kepercayaan, keterlibatan, dan loyalitasnya terhadap organisasi yang

bersangkutan. Indikator pengukuran variabel komitmen organisasi yang dikembangkan oleh luthans (2006) adalah sebagai berikut: (1) bekerja melalui target, (2) gembira memilih bekerja pada organisasi, (3) menerima semua tugas, (4) kesamaan nilai, (5) bangga menjadi bagian organisasi, (6) membanggakan organisasi pada orang lain, (7) organisasi merupakan inspirasi, (8) peduli pada nasib organisasi.

Metode analisis data

Penelitian ini metode analisis datanya menggunakan *structural equation modeling* (sem) yaitu suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi *smartpls* versi 2.0. Metode analisis yang dilakukan antara lain statistik deskriptif, uji outer model, uji inner model, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mode	Mean	Std. Deviation
PP	153	4	13	1414	8	9.24183	1.95686
KPI	153	6	18	2189	15	14.3072	2.85455
AI	153	5	25	1962	12	12.8235	4.32422
KK	153	10	29	3420	27	22.3529	4.27273
KP	153	14	31	4063	31	26.5556	4.88134
BEM	153	11	19	2445	15	15.9804	2.25794
KO	153	9	27	2396	16	15.6601	4.62994
K	153	9	37	2544	10	16.6275	7

Sumber : data yang diolah, 2013

Dari statistik deskriptif pada Tabel dapat diketahui nilai mean pp sebesar 9,24183 yang berarti bahwa penegakan hukum/peraturan masuk dalam kategori tidak tegak. Nilai mean kpi sebesar 14,3072 yang berarti bahwa keefektifan pengendalian internal masuk dalam kategori cukup efektif. Nilai mean ai sebesar 12,8235 yang berarti bahwa asimetri informasi masuk dalam kategori asimetri. Nilai mean kk sebesar 22,3529 yang berarti bahwa

kesesuaian kompensasi masuk dalam kategori sesuai. Nilai mean kp sebesar 26,5556 yang berarti bahwa keadilan prosedural masuk dalam kategori adil. Nilai mean bem sebesar 15,9804 yang berarti bahwa budaya etis manajemen masuk dalam kategori cukup etis. Nilai mean ko sebesar 15,6601 yang berarti bahwa komitmen organisasi masuk dalam kategori tidak berkomitmen. Nilai mean k sebesar 16,6275

yang berarti bahwa kecurangan (*fraud*) masuk dalam kategori sangat jarang terjadi

Uji Outer Model

Uji Convergent Validity

Dalam penelitian ini terdapat 8 variabel yaitu penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, budaya etis manajemen, komitmen organisasi dan *fraud* di sektor pemerintahan. Pegujian validitas penelitian menggunakan alat bantu

hitung yaitu *smartpls* ver 2.0. Dari hasil yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari semua pertanyaan yang diajukan hasilnya valid kecuali indikator *kpi3* dan *bem2*. Untuk indikator *kpi3* tidak dilakukan drop karena merupakan variabel formatif, sedangkan untuk indikator *bem2* dilakukan drop karena merupakan indikator reflektif. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang valid dilakukan pengolahan data.

Uji Composite Reliability

Insert Tabel 2. Uji Reliabilitas

	Composite Reliability		Cronbachs Alpha
Asimetri Informasi	0.886878	Asimetri Informasi	0.846186
Budaya Etis Manajemen	0.883289	Budaya Etis Manajemen	0.824364
Kecurangan (<i>Fraud</i>)	0.963275	Kecurangan (<i>Fraud</i>)	0.956078
Kesesuaian Kompensasi	0.939682	Kesesuaian Kompensasi	0.922963
Komitmen Organisasi	0.931215	Komitmen Organisasi	0.917451
Keadilan Prosedural	0.93759	Keadilan Prosedural	0.920701
Keefektifan Pengendalian Internal		Keefektifan Pengendalian Internal	
Penegakan Hukum/Peraturan	0.813472	Penegakan Hukum/Peraturan	0.694915

Sumber: pengolahan data 2013

Dari uji reliabilitas dilihat bahwa keenam variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena *composite reliability* dan *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk ,yaitu 0,7 kecuali nilai *cronbach alpha* variabel penegakan hukum/peraturan. Variabel yang tidak reliabel sebaiknya tidak digunakan, tetapi pada penelitian ini variabel tersebut tetap digunakan karena apabila dihilangkan maka salah satu tujuan penelitian menjadi tidak terjawab.

konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model pada *correlation of latent variables*, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Uji Inner Model

R-Square

Hasil uji inner model menunjukkan bahwa nilai *r-square* kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan *fraud* (k) 0,952. Nilai *r-square* sebesar 0,952

Uji Discriminant Validity

Berdasarkan tabel hasil uji *discriminant validity* atau uji korelasi antar variabel menunjukkan nilai akar kuadrat ave setiap

Insert **Tabel 3.** Ave & Correlation Of Latent Variables

	AVE	Akar AVE		AI	BEM	FRAUD(K)	KK	KO	KP	KPI	PP
Asimetri Informasi	0.571394	0.755907	AI	1							
Budaya Etis Manajemen	0.654449	0.808981	BEM	0.614946	1						
Kecurangan (<i>Fraud</i>)	0.746336	0.863908	FRAUD (K)	-0.64566	-0.87503	1					
Kesesuaian Kompensasi	0.722048	0.849735	KK	0.489297	0.871583	-0.8418	1				
Komitmen Organisasi	0.631942	0.794948	KO	0.893633	0.454843	-0.6489	0.35202	1			
Keadilan Prosedural	0.684997	0.827646	KP	0.452921	0.870501	-0.8467	0.94071	0.3556	1		
Keefektifan Pengendalian Internal			KPI	0.622303	0.819716	-0.9222	0.73357	0.6419	0.744	1	
Penegakan Hukum/Peraturan	0.522484	0.722831	PP	0.565403	0.859119	-0.8898	0.83375	0.5102	0.835	0.793	1

Sumber: pengolahan data 2013

memiliki arti bahwa variabilitas konstruk kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan yang dapat di jelaskan oleh variabilitas konstruk penegakan hukum/peraturan (pp), keefektifan pengendalian internal (kpi), asimetri informasi

(ai), kesesuaian kompensasi (kk), keadilan prosedural (kp), budaya etis manajemen (bem), komitmen organisasi (ko) sebesar 95,2 % sedangkan 4,8 % dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Uji Hipotesis

Tabel 5 Uji Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
PP -> FRAUD (K)	-0.178291	-0.204247	0.062305	0.062305	2.861601
KPI -> FRAUD (K)	-0.316184	-0.313632	0.037763	0.037763	8.372826
AI -> FRAUD (K)	0.293339	0.288906	0.059832	0.059832	4.902742
KK -> FRAUD (K)	-0.225474	-0.23063	0.078802	0.078802	2.861258
KP -> FRAUD (K)	-0.049083	-0.035309	0.06028	0.06028	0.814248
BEM -> FRAUD (K)	-0.210781	-0.198354	0.054017	0.054017	3.902098
KO -> FRAUD (K)	-0.424396	-0.422275	0.069935	0.069935	6.068426

Sumber: pengolahan data 2013

Variabel penegakan hukum/peraturan (pp) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,179 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,861 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan penegakan hukum/peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_1 dapat diterima.

Penegakan hukum/peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa penegakan hukum/peraturan yang baik di suatu instansi dapat mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel keefektifan pengendalian internal (kpi) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,317 dan nilai *t-statistic* sebesar 8,372 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_2 dapat diterima. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa keefektifan pengendalian internal pegawai yang tinggi di suatu instansi dapat mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel asimetri informasi (ai) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,293 dan nilai *t-statistic* sebesar 4,902 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*, dengan demikian h_3 dapat diterima. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa terjadinya asimetri informasi dapat menyebabkan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel kesesuaian kompensasi (kk) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,226 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,861 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_4 dapat diterima. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa semakin sesuai kompensasi yang diterima pegawai instansi pemerintahan maka akan dapat menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel keadilan prosedural (kp) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,814 berada dibawah nilai kritis 1,977. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara keadilan prosedural terhadap *fraud*, dengan demikian h_5 tidak dapat diterima. Keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti semakin adil

prosedur yang ditetapkan tidak dapat menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel budaya etis manajemen (bem) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,210 dan nilai *t-statistic* sebesar 3,902 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan bahwa budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_6 dapat diterima. Budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa semakin baik budaya yang diterapkan oleh manajemen maka dapat mengurangi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel komitmen organisasi (ko) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0,424 dan nilai *t-statistic* sebesar 6,069 signifikan pada ($p < 0.05$). Ini menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian h_7 dapat diterima. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan yang berarti bahwa semakin baik komitmen seseorang terhadap suatu organisasi maka dapat mengurangi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan; terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan; dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti *fraud* di sektor pemerintahan dari persepsi auditor bpk/bpkp dan menambahkan metode pengumpulan data yang lebih akurat seperti data wawancara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada tuhan yang maha esa, kedua orang tua, kakak dan adikku, dan seluruh anggota keluarga, kedua dosen pembimbing, dosen penguji skripsi atas kritik dan saran guna perbaikan skripsi, seluruh dosen akuntansi, almamaterku yang kubanggakan, teman-teman akuntansi b 2009, sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan selama ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Colquit, jason a. 2001. *On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of measure*. Journal of applied psychology: 86(3): 386-400.
- Ghozali, imam. 2011. *Structural equation modeling: metode alternatif dengan partial least square (pls)*. Edisi 3. Semarang : universitas diponegoro
- Ikatan akuntan indonesia. 2001. *Standar profesional akuntan publik*. Jakarta: salemba empat.
- Ivancevich, et al. 2007. *Perilaku dan manajemen organisasi*. Jakarta: erlangga.
- Luthans, fred. 2006. *Perilaku organisasi*. Diterjemahkan oleh vivin andika yuwono dkk. Edisi pertama. Yogyakarta : penerbit andi.
- Nn. 2010. *Dua koruptor di batang jateng ditetapkan buron*.
[Http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=5245&l=dua-koruptor-di-batang-jateng-ditetapkan-buron](http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=5245&l=dua-koruptor-di-batang-jateng-ditetapkan-buron).
(diakses tanggal 30 november 2012, pukul 09.50 wib).
- Peraturan pemerintah no. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.
- Rae and subramaniam.2008. *Quality of internal control procedures antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud*. Managerial auditing journal vol. 23 no. 2, 2008 pp. 104-124.
- Rahmawati, ardiana peni dan idjang soetikno. 2012. *Analisis pengaruh faktor internal dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi*. Semarang: universitas diponegoro.
- Robbins, s. 2008. *Perilaku organisasi*. Jilid ii. Jakarta: salemba empat
- Sawyer, lawrence b, mortimer a. Dittenhofer dan james h. Scheiner. 2006. *Sawyer's internal auditing*. Jakarta: salemba empat.
- Solo pos online. 2012. *Korupsi: mantan bupati bambang bintoro mulai di sidang*.
[Http://www.solopos.com/2012/05/17/korupsi-mantan-bupati-batang-bambang-bontoro-mulai-disidang-186482](http://www.solopos.com/2012/05/17/korupsi-mantan-bupati-batang-bambang-bontoro-mulai-disidang-186482). (diakses 30 november 2012 pukul 09.44 wib).
- Sulistiyowati.2007. *Pengaruh kepuasan gaji dan kultur organisasi terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi*.yogyakarta: universitas sanata dharma.
- Tuanakotta. 2007. *Audit forensik dan audit investigatif*. Jakarta: fakultas ekonomi universitas indonesia.
- Wilopo. 2006. *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi*. Simposium nasional akuntansi ix.
- Wilopo. 2008. *Pengaruh pengendalian internal birokrasi pemerintah dan pelaku tidak etis birokrasi terhadap kecurangan akuntansi di pemerintah persepsi auditor badan pemeriksa keuangan*. Jurnal ventura volume 11 no. 1 april 2008.